



DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

PERUBAHAN RENJA

DINSOSP2KB KOTA PEKALONGAN



TAHUN 2024



dinsosp2kb.pekalongankota.go.id



dinsosp2kb@gmail.com



(0285) 422868



Jl. Sriwijaya No. 40 Kota Pekalongan



PERUBAHAN RENJA 2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
(DINSOSP2KB)**

**Pemerintah Kota Pekalongan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jl. Sriwijaya No. 40 Telp. (0285) 422868 Pekalongan
Email. dinsosp2kb@gmail.com
Web : dinsosp2kb.pekalongankota.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP2KB) Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat disusun tanpa ada halangan sesuatu apapun.

Perubahan Renja DinsosP2KB Kota Pekalongan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, dalam rangka menjalankan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dalam 4 bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Bab III membahas Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan terakhir Bab IV penutup.

Kami menyadari Perubahan Renja DinsosP2KB Kota Pekalongan Tahun 2024 ini belum sempurna, sehingga masukan, saran dan koreksi semua pihak akan menjadi lebih baik untuk penyusunan renja pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya Perubahan Renja DinsosP2KB Tahun 2024 ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik agar dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Pekalongan



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	8
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB IV. PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evaluasi Renja smpai dengan Triwulan II Tahun 2024	9
Tabel 2. Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat daerah Perubahan Renja 2024	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Gambaran Pelayanan

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang penanggulangan bencana, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada DINSOSP2KB Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Strategis DINSOSP2KB Kota Pekalongan.

Kinerja pelayanan DINSOSP2KB Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik pada urusan Sosial, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

1.2 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Pemerintah Kota Pekalongan, DINSOSP2KB Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, DINSOSP2KB Kota Pekalongan mendukung pencapaian visi “*Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius*” dengan misi pertama “*Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat*” dan misi ketujuh “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government*”

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
3. Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif.

Permasalahan dan Hambatan

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana dan pengendalian penduduk keluarga berencana.

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Kapasitas sumberdaya manusia di DINSOSP2KB Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan tingginya target pencapaian sasaran dan tujuan indikator belumlah ideal. Pengalaman penanganan kemiskinan, kebencanaan dan *stunting* yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya sistem pelayanan publik.
2. Belum optimalnya kinerja organisasi
3. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS
4. Belum optimalnya pencapaian peserta KB aktif

Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Penanggulangan bencana yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini DINSOSP2KB Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik DINSOSP2KB Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, kinerja DINSOSP2KB Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian visi “*Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius*” dengan misi pertama “*Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat*” dan misi ketujuh “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government*”

Tantangan dan Peluang

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinsosp2kb antara lain :

1. Urusan Sosial

- a) Belum optimalnya system pelayanan publik
- b) Minimnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerja sosial.
- c) banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tetapi masih terbatasnya sarana penunjang.
- d) belum adanya database PMKS serta belum adanya terminasi (penyelesaian penanganan) PMKS secara berkelanjutan.
- e) Terbatasnya jumlah personil yang ada dibanding dengan jumlah PMKS yang perlu ditangani.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Belum optimalnya para penyelenggara kegiatan kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS.
- b) Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok kegiatan (Poktan) oleh petugas.
- c) Perlu lebih besar lagi dukungan stakeholder, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan keluarga yg berketahanan.
- d) Cara kerja / sistem komando yg kurang sinkron antara OPD KB kabupaten kota dengan para penyuluh KB yg statusnya sebagai tenaga pusat.
- e) Kurangnya pemahaman remaja tentang usia kawin pertama.

2. Peluang

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program pada urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Pekalongan antara lain :

- a. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah PMKS dan penurunan angka fertilitas penduduk;

- b. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
- c. Terbukanya pengembangan kapasitas DINSOSP2KB melalui kerjasama dengan lembaga baik urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar DINSOSP2KB Kota Pekalongan dengan masyarakat.
- e. Adanya peran serta masyarakat, PSKS dan LSM dalam penurunan jumlah PMKS,
- f. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana dalam operasional urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melalui kementerian / lembaga teknis.
- g. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana dari APBD dan peluang belanja (Dana Alokasi Khusus) oleh pemerintah pusat.
- h. Adanya usaha-usaha peningkatan SDM tenaga pengelola KB oleh BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupa kegiatan orientasi dan pelatihan
- i. Adanya advokasi program KB terhadap pimpinan daerah kabupaten/kota.
- j. Tercukupinya rasio jumlah Penyuluh KB terhadap jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut maka kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja;
2. Meningkatkan dukungan administrasi perkantoran;
3. Meningkatkan dukungan ketercukupan sarpras aparatur;
4. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
5. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan;
7. Peningkatan Perlindungan dan layanan jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin.;
8. Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
9. Peningkatan graduasi KPM PKH;
10. Optimalisasi database kemiskinan;
11. Optimalisasi bantuan sosial bagi kelompok rentan;
12. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Taman Makam pahlawan;
13. Optimalisasi pendataan/updating data keluarga;
14. Penurunan angka kelahiran umur 15-19 tahun;
15. Peningkatan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
16. Peningkatan peran serta ormas dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan serta program nasional maupun program SDGs (Sustainable Development Goals).

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah.

Isu Strategis pada pelayanan urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pelayanan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Sosial

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Sasaran Jangka Menengah pada Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu

3. Sasaran jangka menengah pada Renstra BKKBN

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, sasaran Renstra pada BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.

2. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
4. Meningkatkan advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, telah ditetapkan 3 (tiga) pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK), yang meliputi : KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSK dari sudut kepentingan sosial budaya dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan untuk struktur ruang wilayah kota meliputi Pusat Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota dan 6 (enam) Pusat Lingkungan; serta Sistem Jaringan Prasarana

Meninjau RTRW Kota Pekalongan tentang pengembangan kawasan strategis Kota Pekalongan tersebut maka pelayanan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki peluang dalam mencapai Indikator Kinerja Penurunan Warga Miskin (DTKS)

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi lingkungan di Kota Pekalongan merupakan wilayah rawan bencana hal ini disebabkan letak/wilayah Kota Pekalongan yang berada di pesisir pantai utara dan adanya penurunan permukaan tanah dengan rata-rata 11-23 cm per tahun, bencana yang terjadi di Kota Pekalongan ini menyebabkan rusaknya infrastruktur, mengganggu kesehatan dan berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, Peningkatan abrasi merusak bangunan di sekitar pesisir, hilangnya tambak dan sawah serta meningkatnya kerusakan mangrove.

Ditinjau dari kondisi lingkungan di Kota Pekalongan tersebut, maka pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki hambatan yang cukup besar terutama pada kondisi bencana rob yang menyebabkan banyaknya warga Kota Pekalongan yang terkena dampak rob yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya dan hal ini dapat menjadi penyebab menurunnya kesejahteraan hidup masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, terutama pada faktor KLHS dapat diketahui bahwa Isu yang muncul di Kota pekalongan adalah pada permasalahan lingkungan hidup Kota Pekalongan yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat seperti pencemaran air dan penurunan muka tanah (amblesan) yang berdampak besar terhadap peningkatan wilayah rawan bencana banjir dan rob.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Rencana kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan rencanan strategis DINSOSP2KB Kota Pekalongan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2024 memuat 9 (sembilan) program, 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 53 subkegiatan dengan anggaran senilai Rp. 13.036.773.000,- . Setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan, subkegiatan yang mengalami dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Pekalongan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12.460.916.000.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan renja 2024 DinsosP2KB Kota Pekalongan telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II. Berbagai kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja tahun 2024 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja DinsosP2KB Tahun 2024 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan renstra DinsosP2KB serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara rinci rekapitulasi evaluasi renja dan renstra sampai dengan triwulan II Tahun 2024 akan dijabarkan dalam tabel lebih lanjut.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 pada DinsosP2KB Kota pekalongan dapat dilihat pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator			Pagu Anggaran		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	42.23 persen	42.23	3.841.554.000	1.670.601.969	43.49%
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	36.35 persen	36.35 persen			
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	53.65 persen	53.65 persen			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	17.78 persen	17.78 persen	21.606.000	7.559.000	34.99%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0 dokumen	0 persen	2.552.000	1.749.000	68.53%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	0 dokumen	0 persen	1.804.000	510.000	28.27%
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	8 dokumen	53.33 persen	17.250.000	5.300.000	30.72%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	66.67 persen	66.67 persen	2.782.843.000	1.287.179.142	46.25%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	18 orang/bulan	94.74 persen	2.739.321.000	1.265.867.142	46.21%
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	6 dokumen	50 persen	41.850.000	20.050.000	47.91%
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100 persen	1.672.000	1.162.000	69.50%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	0 persen	0 persen	5.000.000	0	0%
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	0 paket	0 persen	5.000.000	0	0%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	59.05 persen	59.05 persen	249.718.000	116.208.957	46.54%
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 paket	2 paket	50 persen	7.500.000	1.476.000	19.68%

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	1 paket	50 persen	50.867.000	18.410.500	36.19%
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	2 paket	50 persen	5.625.000	2.708.300	48.15%
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	2 paket	50 persen	76.726.000	32.629.000	42.53%
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	2 paket	50 persen	7.500.000	5.557.800	74.10%
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	2.500.000	1.140.000	52.00%
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	95 laporan	63.33 persen	99.000.000	54.287.357	54.84%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	50 persen	50 persen	351.026.000	153.177.549	43.64%
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2 laporan	50 persen	2.400.000	480.000	20.00%
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	6 laporan	50 persen	162.561.000	62.349.777	38.35%
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 laporan	6 laporan	50 persen	186.065.000	90.347.772	48.56%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	53.65 persen	53.65 persen	431.361.000	106.577.321	24.71%
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 unit	8 unit	11.94 persen	230.725.000	68.880.821	29.85%
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	2 unit	25 persen	181.736.000	26.096.500	14.36%
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	31 unit	124 persen	18.900.000	11.600.000	61.38%
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67 persen	47.17 persen	70.40	490.778.000	155.446.365	31.67%
7.	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen	4.58 persen	45.81 persen	184.825.000	87.770.808	47.49%
7.1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Keluarga	0 keluarga	0 persen	184.825.000	87.770.802	47.49%

8.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen	96 persen	128 persen	305.953.000	67.675.563	22.12%
8.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	24 orang	80 persen	74.336.000	0	0%
8.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 orang	4 orang	66.67 persen	162.867.000	62.925.563	38.64%
8.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	0 lembaga	0 persen	68.750.000	4.750.000	6.91%
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	100 persen	100 persen	2.060.482.000	571.239.799	27.72%
9.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen	96 persen	96 persen	1.194.633.000	543.722.991	45.51%
9.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	78 orang	97.50 persen	365.520.000	160.427.6000	43.89%
9.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	78 orang	97.50 persen	829.113.000	383.295.361	46.23%
10.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.68 persen	1.81 persen	49.13 persen	865.849.000	27.516.808	3.18%
10.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	0 orang	0 persen	672.578.000	550.000	0.08%
10.2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu	7 orang	0 orang	0 persen	31.913.000	1.860.000	5.83%

		dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota						
10.4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	0 orang	0 persen	51.161.000	2.500.000	4.89%
10.5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	0 orang	0 persen	56.986.000	0	0%
10.6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83 orang	65 orang	78.31 persen	53.211.000	22.606.808	42.49%
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	55.12 persen	72.06 persen	130.73 persen	1.526.198.000	400.670.644	26.25%
11.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH	10 persen	0.79 persen	7.91 persen	1.526.198.000	400.670.644	26.25%
11.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 orang	1742 orang	87.10 persen	612.094.000	104.927.129	17.14%
11.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 keluarga	484 orang	50.95 persen	914.104.000	295.743.515	32.35%
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	100 persen	100 persen	720.967.000	150.064.669	20.81%
12.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	51.43 persen	51.43 persen	720.967.000	150.064.669	20.81%
12.1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	1543 orang	77.15 persen	426.177.000	150.064.669	35.21%
12.2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1666 orang	0 orang	0 persen	277.000.000	0	0%
12.3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan	2000 orang	1543 orang	0 persen	17.790.000	0	0%

		Kabupaten/Kota						
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen	0 persen	0 persen	265.306.000	25.896.722	9.76%
13	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	0 persen	0 persen	265.306.000	25.896.722	9.76%
13.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	0 persen	200.000.000	0	0%
13.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	1 makam	100 persen	65.306.000	25.869.722	39.65%
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	0 persen	0 persen	254.523.000	35.079.178	13.78%
14.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	0 persen	0 persen	254.523.000	35.079.178	13.78%
14.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	0 dokumen	0 persen	61.403.000	21.009.278	34.22%
14.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	6 laporan	1 laporan	16.67 persen	145.120.000	8.670.000	5.97%
14.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen	7 dokumen	58.33 persen	48.000.000	5.399.900	11.25%
VIII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun	7.60 persen	4.82 persen	157.84 persen	1.883.987.000	410.120.866	21.77%
15.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.73 perseribu	0 perseribu	0 persen	977.304.000	209.084.505	21.39%
15.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	1 laporan	50 persen	80.010.000	6.450.000	8.06%
15.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 laporan	8 laporan	66.67 persen	196.000.000	53.964.046	27.53%
15.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	48 laporan	24 laporan	50 persen	111.360.000	37.120.000	33.33%

	(Minilok)	Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						
15.4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	389.934.000	60.896.709	15.62%
15.5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 organisasi	3 organisasi	100 persen	200.000.000	50.653.750	25.33%
16.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.4 persen	0 persen	0 persen	906.683.000	201.036.361	22.17%
16.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	6 laporan	100 persen	62.452.000	9.120.000	14.60%
16.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 orang	650 orang	63.35 persen	427.747.000	111.781.000	26.13%
16.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	0 unit	100 persen	199.995.000	0	0%
16.4	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	0 laporan	0 persen	216.489.000	80.135.361	37.02%
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	14 persen	11.52 persen	121.50 persen	1.992.978.000	281.707.576	14.14%
17.	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	100 persen	100 persen	1.992.978.000	281.707.576	14.14%
17.1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan	5 organisasi	3 organisasi	60 persen	506.178.000	69.607.576	13.75%

	dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						
17.2	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	6 laporan	54.55 persen	708.000.000	0	0%
17.3	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan	11 laporan	6 laporan	54.55 persen	778.800.000	212.100.000	27.23%

II.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan kuat yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin kritisnya pemikiran masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan, disamping adanya pengaruh globalisasi. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah untuk selalu tanggap atas tuntutan masyarakat dan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang penanggulangan bencana, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada DINSOSP2KB Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Strategis DINSOSP2KB Kota Pekalongan.

Sesuai Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, kegiatan urusan sosial dan pengendalian penduduk di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Sosial dan Pengendalian Penduduk.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
- b. Perumusan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;

- c. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang sosial;
- d. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
- g. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- h. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- i. Pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Isu Strategis berkaitan dengan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
3. Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja atas evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat kami sajikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
 - a. Pembangunan lanjutan kluaster anak sudah dalam proses tahap perencanaan
 - b. Penyesuaian dalam subkegiatan Gaji dan Tunjangan dikarenakan terdapat PNS pension dan PPPK baru ditahun yang sama.

2. Program Pemberdayaan Sosial secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
 - a. Pemberian Hibah ke Lembaga Karang Taruna sudah dalam agenda pemberian di semester II
 - b. Pengadaan Mesin jahit sudah dalam proses pelimpahan pengadaan ke system *e-catalog*.
3. Program Rehabilitasi Sosial secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
 - a. Penyesuaian penerima bantuan sosial untuk Lansia, disabilitas, veteran dan pejuang 3 oktober telah melaksanakan verifikasi dan validasi sehingga pelaksanaannya bisa dilaksanakan di semester II.
 - b. Tidak ada kendala pada verifikasi dan validasi untuk penerima bansos barang kepada yayasan.
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan.
5. Program Penanganan Bencana secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
 - a. Pelaksanaan pada subkegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan belum terlaksana dikarenakan penerima bantuan yang masih di verval oleh tim rehabsos.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
 - a. Pekerjaan fisik sudah selesai tahap perencanaan, dan pekerjaan akan dimulai pada bulan Juli.
7. Program Pengendalian Penduduk secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan.

8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan hanya penyesuaian pagu pada subkegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB untuk pekerjaan DAK Fisik.
9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program, kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan pemerintah daerah.

Rencana kerja Perubahan tahun 2021 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan. Pada prinsipnya program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan tahun 2024 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan secara rinci kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan RENJA 2024

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	3.662.369.000
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	21.606.000
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.552.000
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2.614.000
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	16.440.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.583.658.000
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	2.540.136.000
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	41.850.000
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.672.000
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	5.000.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	277.508.000
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.500.000
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	78.657.000
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	5.625.000
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	76.726.000
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	7.500.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.500.000
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	99.000.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	351.026.000
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2.400.000
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	162.561.000
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 laporan	186.065.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	423.571.000
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 unit	217.333.000
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	187.338.000
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 unit	18.900.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67 persen	440.708.000
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen	182.395.000
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Keluarga	182.395.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen	258.313.000
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	56.816.000
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 orang	132.747.000
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	68.750.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	2.087.927.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen	1.244.173.000
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	415.635.000
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	828.538.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.68 persen	843.754.000
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	672.578.000
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 orang	29.378.000
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	37.036.000
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	51.551.000
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	145 orang	53.211.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	55.12 persen	1.427.838.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH	10 persen	1.427.838.000
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 orang	612.094.000
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 keluarga	815.744.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	448.352.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	448.352.000
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1550 orang	353.562.000
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok	1666 orang	77.000.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
		Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	17.790.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen	265.306.000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	265.306.000
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	200.000.000
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	65.306.000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	254.523.000
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	254.523.000
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	61.403.000
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 laporan	145.120.000
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 dokumen	48.000.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun	7.60 persen	1.880.915.000
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.73 perseribu	977.304.000
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	80.010.000
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 laporan	196.000.000
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 laporan	111.360.000
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	389.934.000
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	3 organisasi	200.000.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
		Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.4 persen	903.611.000
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	62.452.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 orang	427.747.000
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	196.923.000
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	216.489.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	14 persen	1.992.978.000
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	1.992.978.000
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 organisasi	506.178.000
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	708.000.000
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan	10 laporan	778.800.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan selama satu tahun dan pencapaiannya pada triwulan tahun anggaran 2024. Renja Perubahan ini disusun mengacu pada visi misi Walikota Pekalongan dan berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, Perubahan Ketiga Rencana Strategis (Renstra) DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024.

Terbatasnya alokasi anggaran serta proses penganggaran yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna peningkatan mutu pelayanan bidang sosial. Untuk pelaksanaan semua program, kegiatan dan subkegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Perubahan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Pekalongan


TOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007